

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

## ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

### DIDESA POHUWATO KABUPATEN POHUWATO

PURNAMA SARI

[purnamasari966@yahoo.com](mailto:purnamasari966@yahoo.com)

SRI WAHYUNI UMMUR

[sriwahyuni@gmail.com](mailto:sriwahyuni@gmail.com)

STIE Ichsan Pohuwato

#### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Pelayanan. menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Akuntabilitas. menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup. Dan Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pada Kinerja Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan terkait standar operasional sudah baik, maka perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan-pelatihan manajemen dan administrasi untuk para pengelola atau pengurus juga dilakukan pengawasan dari pihak di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), agar tetap tercipta standar pelayanan yang tetap fleksibel namun memiliki wibawa, batasan-batasan tegas dan selektif serta mampu mencari solusi terbaik dari setiap kasus. Kinerja Aspek Akuntabilitas dan Perkembangan Aset Desa diperoleh kesimpulan bahwa Strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan oleh BUMDES di Desa Pohuwato ini telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa. Kinerja Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya BUMDes di Desa Pohuwato telah menambah penghasilan bagi pengurus, komisaris dan juga masyarakat yang terlibat, serta telah mampu mengurangi jumlah pengangguran anak muda yang ada di desa terutama masyarakat nelayan yang tinggal di pinggiran pantai. Selain itu juga dengan adanya depot nelayan dan kios nelayan di Desa Pohuwato secara tidak langsung dapat menghemat biaya transportasi nelayan. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai dengan*

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

*pelaporan keuangan, pelayanan, dan pembagian SHU telah dilaksanakan sesuai peraturan.*

*Kata Kunci : Kinerja Bumdes*

## ABSTRAK

*This study aims to analyze the performance of village-owned enterprises (BUMDes) in terms of service aspects. analyze the Performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in terms of the Accountability Aspect. analyze the Performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in terms of aspects of improving living standards. And to analyze the Performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in terms of compliance with the Law has been implemented. The research method used is a qualitative research method using research informants. The results of the research show that service performance, profitability and sustainability related to operational standards are good, it is necessary to improve the quality and quantity of management and administration training for managers or administrators as well as supervision from parties in the Village Community Empowerment Agency (BPMD), so that it remains created service standards that remain flexible but have authority, strict and selective boundaries and are able to find the best solution in each case.*

*Performance Aspect of Accountability and Village Asset Development The conclusion is that the asset management strategy (increased accountability) undertaken by BUMDES in Pohuwato Village has contributed and can increase village income. Performance Performance Improvement Aspects can be concluded that the presence of BUMDes in the Village of Pohuwato has added income for the management, commissioners and also the people involved, and has been able to reduce the number of unemployed young people in the village, especially fishing communities who live on the coast. In addition, the existence of fishermen depots and fishing stalls in Pohuwato Village can indirectly save fishermen's transportation costs. Compliance with the Laws and Regulations of BUMDes management has been carried out in accordance with financial reporting, service, and SHU distribution has been carried out according to regulations.*

*Keywords: Bumdes Performance*

## PENDAHULUAN

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan

masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Dan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep kebutuhan masyarakat.

Pemerintah telah memberikan solusi perubahan, pada era reformasi tahun 1999 di putuskan UU 22/1999 (pasal 108) yang mendorong pembentukan badan usaha atau lembaga yang digunakan untuk mengelola sumber dayanya secara efisien. Lalu diperjelas oleh PP 72/2005 (pasal 78 ayat 1) yang menyatakan bahwa “Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa”, karena desa perlu suatu lembaga untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pendirian BUMDes ini dikenal empat tahapan; Pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan Pengelolaan BUMDes dan penetapan Persyaratan Pemegang Jabatan, diadakan pula Monitoring dan Evaluasi, dan yang terakhir diadakan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengelola. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Ketimpangan dalam pelaksanaannya, dan hasil yang tidak merata tidak bisa lepas dari

perkembangan program BUMDes. Masih banyak BUMDes yang gagal, namun banyak pula BUMDes yang berhasil dan mandiri.

Penelitian ini diadakan pada daerah yang memiliki area perdesaan yang luas yaitu di Kabupaten Pohuwato, di mana merupakan daerah yang memiliki beragam macam produk lokal yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa. Di Kabupaten Pohuwato, program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes sudah berjalan namun terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai daerah. Terdapat BUMDes yang berhasil dan masih banyak BUMDes yang gagal menggali potensi desanya, banyak pula BUMDes yang berhasil meningkatkan perekonomian desanya dan mendorong kemandirian masyarakat. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa yang berada di kawasan Pesisir Pantai di Ibukota Kabupaten Pohuwato ini, Badan Usaha ini digagas dan dibentuk oleh Pemerintah Desa Pohuwato melalui musyawarah Desa bersama masyarakat pada Tahun 2016. Dengan demikian, Bumdes ini baru berumur 2 Tahun. namun Meski diusia masih seumur jagung ini ternyata para pengurusnya mampu menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha yang dimandatkan melalui mekanisme penyertaan modal oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil **Pendapatan Asli Desa (PAD)** yang setiap Tahunnya kian meningkat, Karena pada Tahun 2017 Bumdes menyetorkan bagi Hasil tiga puluh

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

persennya ke rekening Desa Sebesar Rp. 6.006.000. Bahkan diluar dugaan saya ternyata dalam hitungan semester I pada Tahun 2018 ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana pada hasil Rapat Kerja Semester I kemarin saya melihat sudah ada bagian 30 % yang akan disetorkan oleh Bumdes Sebesar Rp. 6.200.000. itu baru hasil kerja enam bulan, gimana nanti kalo penghasilan setahun.  
*Pungkas Kepala Desa.*  
<http://pohuwato.sideka.id/2018/06/14/kades-pohuwato-apresiasi-kinerjabumdes>  
(diakses pada tanggal 09 januari 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mahendra Adi Nugraha (2015), dengan judul penelitian Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi (Studi di Kabupaten Tulungagung) dimana hasil penelitian tersebut bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek

Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.

Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkup Kabupaten Pohuwato tepatnya pada desa pohuwato, mengingat banyaknya desa yang melaksanakan program BUMDes ini serta masih terjadi ketimpangan antar desa pelaksana program BUMDes. Juga perlu dilakukan penelitian lebih dalam agar dapat diungkap apakah pada program BUMDes di Desa Pohuwato, masyarakat lebih terlibat sebagai pelaku ataukah hanya sebagai obyek. Oleh karena itu, dinilai perlu untuk mengadakan penelitian mengenai “**Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pohuwato Kabupaten Pohuwato**”.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Pelayanan.
2. Bagaimana Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Akuntabilitas.
3. Bagaimana Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup.
4. Bagaimana Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakan.

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Pelayanan.
2. Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Akuntabilitas.
3. Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup.
4. Untuk menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakan.

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk:

1. Praktisi; yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah maupun pemerintah desa serta pengelola untuk lebih mampu mengoptimalkan kinerja dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Akademisi; sebagai tambahan literatur atau bahan bacaan baik dosen maupun mahasiswa yang ingin mengetahui tentang kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari Aspek Pelayanan, Aspek Akuntabilitas. Aspek Peningkatan Taraf Hidup dan

ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Kinerja.

Mahmudi (2010:21) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ialah:

- a. Faktor personal/individual, meliputi pengetahuan, ketrampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader;
- c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;
- d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;
- e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Prawirosentono dalam Paolong (2008:197), mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut Rivai, Basri, dalam Sinambela (2012:6) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Otley dalam Mahmudi (2010:6) mengatakan bahwa kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut.

Kinerja BUMDes dapat diukur dari berbagai unsur, antara lain: 1. Tingkat Kooperatif, Partisipasi, dan Emansipatif pengelola dan masyarakat dalam program pemberdayaan 2. Transparansi, Akuntabilitas, dan Sustainability BUMDes. 3. Implikasi terhadap Kemandirian Ekonomi masyarakat.

Menurut Panduan Pendirian dan Pengelolaan (PPP) BUMDes (2007) perlu dilakukan identifikasi terhadap kinerja dan prospek kedepan. Misalnya:

1. Bagaimana perkembangan omzet penjualan dalam setiap periode (bulanan/ tahunan)?
2. Bagaimana perolehan laba/rugi pada setiap periode (bulanan/tahunan)?
3. Bagaimana kondisi barang/jasa yang diusahakan (kuantitas, kualitas, keragaman pilihan, dll)?

4. Bagaimana sistem pelayanannya kepada konsumen?
5. Upaya promosi apa saja yang sudah dilakukan?
6. Di mana letak lokasi usahanya?
7. Mungkinkah suatu unit usaha melakukan ekspansi?

Bila perkembangan omzet penjualan lambat atau perputaran barang/jasa rendah, berarti unit usaha tersebut ada masalah. Masalah inilah yang harus segera diatasi agar omzet penjualan bisa meningkat. Tugas mengevaluasi kinerja unit usaha ini adalah menjadi tanggungjawab manajer unit usaha beserta pengurus BUMDes. *Output* BUMDes berupa kinerja BUMDes dapat ditinjau melalui beberapa aspek yang merupakan tujuan dari BUMDes itu sendiri berdasarkan PPP BUMDes (2007), yaitu:

- a. Pelayanan–Keuntungan–Keberlangsungan;
- b. Akuntabilitas–Perkembangan Aset Desa;
- c. Peningkatan Taraf Hidup Pengurus–Komisaris–Masyarakat;
- d. Ketaatan BUMDes terhadap peraturan dan Perundang–Undangan;

## Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57).

Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Iffe (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment aims to increase the power of disadvantage)”.

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan

kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

## Konsep Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris participate yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201- 202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya

Mikkelsen dalam Soetomo (2006) bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Conyer dalam Soetomo (2006), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai

agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.

3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (community development)

Menurut Slamet (2003), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis :

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu partisipasi masyarakat dinilai penting dalam proses pemberdayaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada keberlangsungan program itu sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis. **Pendekatan Partisipasi Masyarakat**

Dalam buku Depdiknas (2001), bahwa bentuk partisipasi masyarakat antara lain: a. Pengawasan terhadap anak-anak. b. Tenaga yaitu sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu mensukseskan wajib belajar dan pelaksanaan KBM, serta memperbaiki sarana-prasarana baik secara individu maupun gotongroyong. c. Dana untuk membantu pendanaan operasional sekolah, memberikan bea siswa, menjadi orang tua asuh, menjadi sponsor dalam kegiatan sekolah dan sebagainya. d. Pemikiran yaitu memberikan masukan berupa pendapat, pemikiran dalam rangka menjaring anak-anak usia sekolah, menanggulangi anakanak putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003), beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertical.

2. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
4. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat

Dari beberapa kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu bentuk finansial, sarana/prasarana, tenaga/keahlian dan moril. Partisipasi dalam bentuk finansial misalnya partisipasi pemberian sumbangan, pinjaman, beasiswa, dll. Partisipasi dalam bentuk sarana/prasarana misalnya bantuan buku pelajaran, pengadaan dan bantuan ruangan, gedung, tanah dan lain sebagainya. Bentuk tenaga dan keahlian misalnya partisipasi tenaga, baik tenaga kependidikan, tenaga ahli, keterampilan dalam membantu KBM, ikut

serta dalam program pendidikan memperbaiki sarana-prasarana dll. Bentuk moril misalnya partisipasi buah pikiran, pendapat/ ide, saran, pertimbangan, nasehat dukungan moril dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau dalam pengambilan suatu keputusan dan atau dalam penyelenggaraan pengembangan pembelajaran.

## Strategi Partisipasi Masyarakat

Strategi partisipasi masyarakat menurut Notoatmodjo (2007) adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Sosial Desa atau Lembaga Kerja Pembangunan Masyarakat Desa (LKPM) adalah suatu wadah kegiatan antar disiplin di tingkat desa dan kelurahan. Tugasnya adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan di kesehatan. Tenaga kesehatan dari puskesmas dapat memanfaatkan lembaga ini untuk menjual idenya, dengan memasukkan ide-idenya ke dalam program LKPM.
2. Kegiatan non kesehatan yang akhirnya akan menyokong program kesehatan, misalnya; pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain-lain
3. Puskesmas dapat dijadikan pusat kegiatan, walaupun pusat perencanaannya adalah di desa (LKPM), dan petugas kesehatan adalah merupakan motivator dan dinamisatornya.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

4. Dokter puskesmas atau petugas kesehatan yang lain dapat membentuk suatu team work yang baik dengan dinas-dinas atau instansi-instansi lain.
5. Dalam pelaksanaan, program dapat dimulai desa demi desa tidak usah seluruh desa di kecamatan tersebut. Hal ini untuk menjamin agar puskesmas dapat memonitor dan membimbingnya dengan baik. Bilamana perlu membentuk suatu proyek percontohan sebagai pusat pengembangan untuk desa yang lain.
6. Bila desa ini masih dianggap terlalu besar, maka dapat dimulainya dari tingkat RW atau RT yang populasinya lebih kecil, sehingga mudah diorganisasi.

Notoatmodjo (2005) menyatakan bahwa metode yang dapat dipakai pada partisipasi masyarakat sebagai berikut: 1. Pendekatan Masyarakat : diperlukan untuk memperoleh simpati masyarakat, terutama ditunjukkan kepada pimpinan masyarakat baik secara formal dan informal. 2. Pengorganisasian masyarakat, dan pembentukan panitia (tim) a. Dikoordinasi oleh lurah atau kepala desa b. Tim kerja yang dibentuk tiap RT. 3. Survei Diri (Community Self Survey) : melakukan survei dan diolah serta dipresentasikan kepada warganya

masing-masing. 4. Perencanaan Program : dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah mendengarkan presentasi survei diri dari tim kerja dan memecahkan masalahnya. 5. Training : untuk para kader kesehatan sukarela harus dipimpin oleh dokter puskesmas. 6. Rencana Evaluasi : perlu ditetapkan kriteria-kriteria keberhasilan suatu program, secara sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat atau kader kesehatan sendiri.

Menurut Sastropetro (1988), ada lima unsur penting yang menentukan gagal dan berhasilnya partisipasi, yaitu: 1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil. 2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran. 3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan. 4. Kesiediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain. 5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1. Adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat dan penolakan eksternal terhadap pemerintah. 2. Kurangnya dana. 3. Terbatasnya informasi,

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

pengetahuan atau pendidikan masyarakat, dan 4. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

## Konsep kemandirian Ekonomi Masyarakat

Menurut Avilliani (2012) kemandirian ekonomi diartikan sebagai bangsa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada negara lain. Terkait dengan hal ini Avilliani menyampaikan beberapa kondisi Indonesia sebagai berikut: 1. Indonesia memiliki banyak potensi untuk menggerakkan perekonomian nasional, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya manusia (SDM). Contoh di bidang SDA adalah agro industri dan sektor riil. Pertanian menjadi penyedia lapangan kerja sebesar (40% dari total angkatan kerja), tetapi daya saing produk pertanian lemah. 2. Indonesia berhasil melewati krisis ekonomi global (2008) dengan baik, sejajar dengan Republik Cina (RRC) dan India melalui pertumbuhan ekonomi yang positif.

Terdapat tiga solusi untuk meningkatkan jati diri dan kemandirian Ekonomi Bangsa, yaitu: 1. Efisiensi, pemerintah harus menjamin uang APBN dan APBD dikeluarkan dengan prinsip efisiensi 2. Ekspansi, perusahaan (BUMN) harus melakukan ekspansi pada sektor strategis dan menasionalisasi beberapa sektor, seperti migas diserahkan saja ke Pertamina. 3. Penetrasi pasar, dalam hal ini BUMN dan swasta lokal harus melakukan penetrasi pasar, agar tidak direbut negara lain Kemandirian ekonomi dapat dimulai dari pembangunan ekonomi lokal terkait

dengan sikap dan langkah pemerintah lokal dalam merancang dan melaksanakan Local Economic Development (LED) atau Pembangunan Ekonomi Lokal. Pernyataan ini, senada dengan pendapat Sarbini (1987) yang menyarankan perlunya reorientasi pembangunan sebagai berikut: 1. Pembangunan diprioritaskan ke perdesaan mengingat populasi terbesar masyarakat Indonesia berada di perdesaan. Pembangunan 8 perkotaan lebih diarahkan untuk mendukung perekonomian perdesaan 2. Pengembangan kapasitas SDM perdesaan secara intens dan peningkatan produktivitas masyarakat melalui teknologi madya dan pemerataan penguasaan alat produksi 3. Pengembangan industrialisasi perdesaan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan pasar domestik ataupun pasar luar 4. Penataan kembali usaha budidaya pertanian agar bisa memenuhi skala yang ekonomis. Hal tersebut diperkuat oleh Department For International Development (2003) yang menyatakan bahwa LED berarti bekerja secara langsung membangun kekuatan ekonomi lokal suatu wilayah untuk memperbaiki ekonomi tersebut dan kualitas hidup masyarakat dimasa depan

Dalam penelitian ini output BUMDes berupa kinerja BUMDes dalam penelitian ini ditinjau melalui beberapa aspek yang merupakan tujuan dari BUMDes itu sendiri berdasarkan PPP BUMDes (2007), yaitu: 1. Pelayanan ; 2. Akuntabilitas 3. Peningkatan Taraf Hidup 4. Ketaatan BUMDes terhadap peraturan dan Perundang-Undangan.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

## Metodologi Penelitian

### Desain penelitian

Menurut Husain Umar (2002 : 36), bahwa desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dan komprehensif mengenai hubungan-hubungan antar variabel yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam perencanaan tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis akhir.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah pemberian arti atau mendefinisikan istilah-istilah pokok yang ada dalam penelitian, dan merupakan penjelasan bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data dan indikator-indikator yang diinginkan.

Agar memudahkan dan menghindari multitafsir atas makna dari penelitian ini, maka peneliti menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut :

- a. Pelayanan terkait Keuntungan dan Keberlangsungan;
- b. Akuntabilitas terkait Perkembangan Aset Desa;
- c. Peningkatan Taraf Hidup terkait taraf hidup Pengurus, Komisaris dan Masyarakat;
- d. Ketaatan BUMDes terhadap peraturan dan Perundang–Undangan;

### Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan literatur-literatur baik itu buku-buku, majalah-majalah, maupun buletin-buletin yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data primer ini terutama diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Interview yaitu pengumpulan data yang dilakukan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 3.2.4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Data kualitatif, yaitu data-data yang berupa pernyataan-pernyataan atau uraian-uraian dari sumber data yang ada.

#### b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

asalnya, data primer di peroleh melalui :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - b. Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data skunder diperoleh melalui :
    - a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penulusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
    - b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman atau bahkan orang-orang yang juga pelaku yang terlibat langsung

dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Marisa Utara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pohuwato.
2. Kepala Desa Marisa Utara.
3. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
5. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Marisa Utara.
6. Masyarakat Yang terlibat.

## Metode Analisis

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisa kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil study lapang maupun *study literature* untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum BUMDes Pohuwato

Desa Pohuwato merupakan salah satu Desa yang berada di ibukota Kabupaten Pohuwato yang terletak pada bagian selatan teluk Tomini yang berada diwilayah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo. Sejak awal

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

terbentuknya desa Pohuwato pada tahun 1986 telah dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku. Diantaranya adalah suku bugis, tionghoa, jawa dan gorontalo, namun secara mayoritas Desa ini dihuni oleh masyarakat gorontalo. Nama desa Pohuwato sendiri berasal dari kata pilohuwata dan tolohuwata, pilohuwata pada tahun 1801 dikampung marisa dihuni oleh dua suku yaitu suku palapo dan suku gorontalo, pada waktu itu antara suku palapo dan suku gorontalo terjadi perselisihan paham dan mengakibatkan perang antara kedua suku, pada akhirnya suku palapo kalah dalam perang lalu melarikan diri untuk bersembunyi melalui Topi lo Pohuwato (Sungai lo Pohuwato) sehingga hal tersebut menjadi inspirasi bagi para penggagas pembentukan Desa agar Desa ini dapat dinamakan Desa Pohuwato.

Sebelum era otonomi daerah, desa ini merupakan bagian dari kabupaten Gorontalo. Pada tahun 1999, kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi dua kabupaten dan Desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo. Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 2003 kabupaten Boalemo dimekarkan kembali dan desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Pohuwato, sejak mulai tahun 2007, Desa Pohuwato terbagi menjadi 2 wilayah administrasi yakni Desa Pohuwato Timur yang terletak di bagian Timur dan Desa Pohuwato yang terletak di bagian barat yang hanya di batasi dengan jalan sebagai perbatasan antara dua Desa tersebut. Desa Pohuwato sendiri terdiri dari 3 Dusun yaitu

Dusun Kramat, Dusun Andalas, dan Dusun Bina Kaya.

Panua Mandiri itulah nama dari Badan Usaha Milik Desa yang berada di kawasan Pesisir Pantai di Ibukota Kabupaten Pohuwato ini, Badan Usaha ini digagas dan dibentuk oleh Pemerintah Desa Pohuwato melalui musyawarah Desa bersama masyarakat pada Tahun 2016. Dengan demikian, Bumdes ini baru berumur 2 Tahun. namun Meski diusia masih seumur jagung ini ternyata para pengurusnya mampu menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha yang dimandatkan melalui mekanisme penyertaan modal oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Pusat. Beberapa jenis usaha yang di kelola Bumdes Panua Mandiri, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Nampak pada gambar diatas bahwa unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Panua Mandiri adalah, unit usaha kios nelayan, unit usaha Micro Bus, unit Usaha Tenda dan juga Depot Nelayan.

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kinerja BUMDes Ditinjau dari Layanan-Keuntungan-Keberlangsungan

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial institution) dan komersial (commercial institutions). Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Dengan demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Menurut PKDSP (2007), yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti: 1) usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; 2) penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; 4) Industri dan kerajinan rakyat. Mahendra Adi Nugraha (2016).

Berdasarkan informasi dari beberapa informan bahwa layanan BUMDes di Desa Pohuwato sudah dilaksanakan dengan profesional dan fleksible, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya produktivitas masyarakat desa tersebut serta pengembangan usaha pada BUMDes dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dalam meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha pinjam, usaha riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat mendorong kreatifitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya.

Keuntungan dari usaha-usaha riil yang di bentuk oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada didesa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Dari seluruh penjabaran sebelumnya, diketahui bahwa kinerja BUMDes yang baik dapat ditinjau dari hubungan antara layanan, keuntungan, dan keberlangsungannya. Kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat sangat mempengaruhi aspek yang lain. Dari pelayanan yang baik akan memicu masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada BUMDes, kenaikan jumlah konsumen juga akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan akhirnya keuntungan yang diperoleh juga akan mengalami kenaikan. Pendapatan dan keuntungan yang stabil dan terus meningkat akan menjaga keberlangsungan BUMDes itu sendiri.

### Kinerja BUMDes Ditinjau dari Akuntabilitas-Perkembangan Aset Desa.

Strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan aset desa menurut perlu ada strategi melalui: Pertama, mengamati lingkungan yang hasilnya dapat mengetahui potensi kegiatan usaha apa yang sesuai untuk diterapkan di BUMDes. Adapun strategi yang dapat digunakan oleh BUMDes meliputi strategi pengembangan produk, penetapan harga dan strategi keuangan. Kedua, Penyusunan strategi, 1) Pengembangan Produk, 2) Penetapan Harga, 3) Strategi Keuangan. Ketiga,

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Pelaksanaan Strategi. Keempat, Evaluasi atau Kontrol, yang dilakukan oleh Kepala Desa hal tersebut dikarenakan Kepala Desa diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUMDes di desa.

Dari beberapa informasi yang didapatkan dari informan dan juga data sekunder berupa laporan keuangan BUMDes, di peroleh kesimpulan bahwa Strategi

manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan oleh BUMDES di Desa Pohuwato ini telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa dari tahun 2017 dan juga mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2018.

Dari peningkatan akuntabilitas BUMDes yang dilakukan tersebut, asset desa dapat terselamatkan. Semua program bantuan dari pemerintah yang turun dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijaga keberadaannya. Dengan BUMDes yang berperan sebagai wadah untuk program-program lainnya, maka diharapkan nantinya seluruh aset desa yang didapat bisa tercatat, dipertanggungjawabkan dan dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan BUMDes itu sendiri.

## **Kinerja BUMDes Ditinjau dari peningkatan Taraf Hidup Pengurus – Komisaris – Masyarakat.**

Mengacu pada salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, maka dapat diidentifikasi salah satu kinerja BUMDes

dapat ditinjau dari peningkatan taraf hidup pengurus, komisaris dan masyarakat. Dengan terbentuknya BUMDes di desa-desa tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes, yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat. Dan diharapkan BUMDes tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya antara lain dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat, sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa.

Selain untuk meningkatkan sumber daya manusia harus dilakukan juga pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus yang nantinya ilmu dan wawasan tersebut dapat bermanfaat bagi pengurus dan dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan jika semalin profesional maka nantinya akan meningkatkan kualitas dan kinerja BUMDes, serta dapat menjaga keberlangsungan program BUMDes di desa tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya BUMDes di Desa Pohuwato telah menambah penghasilan bagi pengurus, komisaris dan juga masyarakat yang terlibat, serta telah mampu mengurangi jumlah pengangguran anak muda yang ada di desa terutama masyarakat nelayan yang tinggal di pinggiran pantai. Selain itu juga dengan adanya depot nelayan dan kios nelayan di Desa Pohuwato secara tidak

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

langsung dapat menghemat biaya transportasi nelayan pada saat mencari bahan untuk keperluan menangkap ikan dilaut, karena dengan berkurangnya biaya yang timbul dapat meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh nelayan.

## **Kinerja BUMDes Ditinjau dari Ketaatan Pada Peraturan dan Perundang-undangan.**

Selain dua tinjauan kinerja BUMDes yang telah dikemukakan sebelumnya, kinerja BUMDes yang lain ditinjau dari bagaimana BUMDes mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh aspek BUMDes diatur dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, kepatuhan pada standar operasional dapat menentukan baik atau buruknya perkembangan BUMDes. Secara sederhana ketaatan peraturan ini dapat digambarkan dengan pelaporan tahunan. Pada pengelolaan BUMDes yang baik, undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi acuan untuk menjaga keberlangsungan dan kinerja BUMDes agar tetap maksimal. Kepatuhan pengurus BUMDes terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu aspek tinjauan kinerja suatu BUMDes karena dengan pengelolaan yang sesuai prosedur akan didapat hasil maksimal yang dapat menguntungkan untuk BUMDes, tapi disisi lain masyarakat juga terbantu dan pada akhirnya masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan dari pengembangan perekonomiannya yang didukung oleh BUMDes di desa tersebut. BUMDes yang dikelola sesuai prosedur dan peraturan akan berjalan baik, dapat dilaporkan dan akan

terus berkembang untuk ikut berpartisipasi mensejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh bahwa , pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai dengan pelaporan keuangan, pelayanan, dan pembagian SHU telah dilaksanakan sesuai peraturan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada sebelumnya, kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada Kinerja Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan terkait standar operasional sudah baik, maka perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan-pelatihan manajemen dan administrasi untuk para pengelola atau pengurus juga dilakukan pengawasan dari pihak di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), agar tetap tercipta standar pelayanan yang tetap fleksibel namun memiliki wibawa, batasan-batasan tegas dan selektif serta mampu mencari solusi terbaik dari setiap kasus.
2. Mengacu pada Kinerja Aspek Akuntabilitas dan Perkembangan Aset Desa diperoleh kesimpulan bahwa Strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan oleh BUMDES di Desa Pohuwato ini telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa.
3. Mengacu pada Kinerja Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya BUMDes di Desa Pohuwato telah menambah penghasilan bagi pengurus,

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 426– 4

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

komisaris dan juga masyarakat yang terlibat, serta telah mampu mengurangi jumlah pengangguran anak muda yang ada di desa terutama masyarakat nelayan yang tinggal di pinggiran pantai. Selain itu juga dengan adanya depot nelayan dan kios nelayan di Desa Puhwato secara tidak langsung dapat menghemat biaya transportasi nelayan.

4. Mengacu pada Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai dengan pelaporan keuangan, pelayanan, dan pembagian SHU telah dilaksanakan sesuai peraturan.

## Saran

Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pengurus BUMDEs agar lebih memperhatikan tingkat pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat pada khususnya dan juga taraf hidup pengurus pada umumnya.
2. Kepada Masyarakat agar kiranya dapat lebih berkontribusi dalam pengembangan BUMDEs.
3. Mengelola BUMDes akan lebih baik apabila ada unsur kerjasama yang baik dan terjaga, konsisten dan berkesinambungan, baik itu dari pihak pengelola, masyarakat ataupun pemerintah desa setempat agar supaya harapan yang di inginkan dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani.2004.Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Aziz Moh. Ali dkk, 2005. Dakwah pemberdayaan masyarakat paradigma Aksi Metodologi. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara
- Depdiknas.2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia .Jakarta: Balai Pustaka
- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi .2001. Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah.Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- Mahendra Adi Nugraha. 2015. Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi (Studi di Kabupaten Tulungagung)
- Mikkelsen Britha.2003.Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Notoatmodjo.2007. pendidikan dan perilaku kesehatan.Rineka Cipta. Jakarta
- Panduan Pendirian dan Pengelolaan (PPP) BUMDes.2007.
- Pasolong Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi.Bandung: CV ALFABETA